

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Periode: Januari – Maret 2025



**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2025 Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja selama masa Triwulan I Tahun 2025 atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Laporan Kinerja ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Triwulan I tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan I tahun 2025 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, April 2025
Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Jaminan Produk Halal



N. E. A. Chuzaimi Abidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1. Maksud	6
2. Tujuan	6
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	10
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	11
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	14
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI	22
B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	47
C. HIGHLIGHT KINERJA	48
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan salah satu unit organisasi Eselon I di BPJPH yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal; dan 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH; dan 2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya pembinaan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja, namun untuk keduanya belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, namun untuk ketiganya belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 7,70%. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan belum terlaksananya realisasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 21%.

Sasaran kegiatan dari Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 24,17%. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 19,83%. Indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 11,9%. Indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan belum terdapat realiasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Beberapa indikator kinerja belum memiliki realisasi karena Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan unit kerja baru di bawah BPJPH sebagai LPNK yang masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yaitu sebesar Rp 20.015.965.000,- (dua puluh milyar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp47.837.930,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 0,24 % dari total pagu anggaran, ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan pada triwulan I namun belum dilakukan pengajuan pencairan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja Triwulan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025

2. Tujuan

Laporan kinerja triwulan I Tahun 2025 berujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal . BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BPJPH terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibuatlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di BPJPH.

Struktur organisasi dari Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal yang masing-masing memiliki subdirektorat di bawahnya. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH. Sedangkan, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang pengawasan JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH.

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal



Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal membawahi dua direktorat utama:

1. Direktorat Pembinaan JPH

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

2. Direktorat Pengawasan JPH

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Fungsi Pendukung

- a. Tata Usaha Deputi: Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan anggaran)
- b. Tim Teknis dan Kelompok Kerja: Mendukung pelaksanaan program strategis, evaluasi, dan pelaporan.

Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki adalah sebanyak 43 Pegawai terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Anggaran

Anggaran bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: **SP DIPA-142.01.1.693733/2025** yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2025 sebesar Rp. 20.015.965.000,- (Dua puluh miliar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran Program, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan”** Untuk mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “tingkat literasi produk dan jasa halal”.

BPJPH telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- **Tujuan 2:** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
- **Tujuan 3:** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- **Tujuan 4:** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH berperan dalam mencapai tujuan 2, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Adapun indikator maupun ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- 1) Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- 2) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Adapun RKT Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
			b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
			b Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
			c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%
2	Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
			b Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang	100%

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	
			c Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
			d Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
			e Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%
3	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal	Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			b Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPJPH tahun 2025-2029 dan DIPA BPJPH Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan

sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan unit kerja dibawahnya, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
		b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
		c	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BINA JAMINAN PRODUK HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

		c	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
--	--	---	---	-----

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Bina Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
		d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
		e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi beserta anggarannya. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut :

[illegible]

2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	051. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal													184.751.000					
																	141.151.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	052. Pelatihan Kompetensi dan Kualifikasi Lembaga Pelembagaan Jaminan Produk Halal													108.047.000					
																	827.846.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	053. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													1.051.563.000					
																	1.000.000.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	054. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													229.237.000					
																	357.178.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	055. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													135.754.000					
																	91.961.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	056. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													95.900.000					
																	103.844.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	057. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													143.680.000					
																	648.482.000					
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	1.	7161.QDB.001. Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	058. Pembinaan Lembaga Jaminan Produk Halal - BLU													273.052.000					
																	5.619.637.000					
					ANGGARAN																	
					SUB KOMPONEN																	
					D. Fasilitas Business Matching Bersama Pengelola Karantina (Madrasah, PTN, Kantor Kementerian Agama, KUA), LPM, LPJH, dan Soglas Layanan Halal												410.612.000					
					E. Fasilitas Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Karantina Bersama (ITEN, Dirjen Perhita, dan Soglas Layanan JPH)												140.845.000					
					F. Business Matching bagi Pelaku Usaha dan Soglas Layanan JPH dan Pemerintah Daerah												793.785.000					
					G. Rapat Koordinasi Pengkaderan Kompetensial JPH dan Soglas Layanan												42.470.000					
					H. Rapat Koordinasi Terpadu JPH dan Soglas Layanan												363.219.000					
					A. Raker JPH dan P3H oleh Soglas Halal												2.513.171.000					
					B. Pembinaan JPH bagi Pelaku Usaha Sektor												487.516.000					
					C. Business Matching bagi Usaha Menengah dan Besar												317.480.000					
					E. Pembinaan Pelaku Usaha												239.720.000					
					B. Elemen Halal (Halal Goes to Campus)												342.849.000					
					ANGGARAN																	
					SUB KOMPONEN																	
					A. Literasi Sader Halal bagi Masyarakat												5.067.516.000					
					TOTAL												24.523.129.000					



4 Februari 2025
Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

Shuaimi Abidin

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

-18-

NO	SAGARAN REGARAN	2.	7161.QDC-001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terdina	B. Edukasi Halal (Halal Goes to Campus)										342.848.000	
					TARGET											
1	Meningkatnya pembiayaan lembaga dan SDM JPH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM												ANGGARAN		
		NO	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN												
				SUB KOMPONEN												
		1.	7161.QDC-001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terdina	A. Literasi Sadar Halal Bagi Kelompok Masyarakat										5.067.536.000	
TOTAL																
16.039.985.000																

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Bina Jaminan Produk Halal,



Indah Ferid Wuljidi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Lembaga JPH dan SDM Halal	1. 7161.QIC.001. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	051. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	H. Pengawasan Jasa Penyembelihan (Bersama Pengawat Daerah)												297.865.000
	1. 7161.QIC.002. SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH	051. Pengawasan Kepada SDM Halal	C. Pengawasan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat (BPPM, K/L Lain, Sngat Daerah)												259.056.000
NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET												ANGGARAN
	a. Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
					10.80%						73.67%				75%
	b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal		SUB KOMPONEN												942.430.000
1			KOMPONEN												
			RINCIAN OUTPUT												
			B. Harmonisasi jabatan fungsional Pengawas JPH												86.873.000
			C. Pembinaan dan Uji Kompetensinya Calon Pengawas JPH												119.140.000
			D. Peningkatan Teknis Pengawasan JPH bagi Pengawat Daerah												367.513.000
			E. Sosialisasi Pedoman Pengawasan JPH												130.987.000
			F. Dilat Pengawas Daerah												238.085.000
			TOTAL												8.483.144.00

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal



Muti Setyo Hartono

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$
Baik	$=100\%$
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$
Kurang	$<70\%$

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program antara lain sebagai berikut :

1. **Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jaminan Produk Halal**

a. **Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan I (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-

1) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH yang Ditindaklanjuti**

Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH adalah tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti adalah jumlah dari total rekomendasi hasil pengawasan JPH yang telah mendapatkan tindak lanjut. Semakin tinggi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti maka semakin tinggi efektivitas pengawasan Jaminan Produk Halal yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap produk halal yang beredar di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 90% atau sebanyak 53 Kota/Kabupaten. Pada triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan belum ditetapkan target pada Rencana Kinerja Tahunan dan belum terdapat capaian indikator kinerja karena proses pengawasan masih berlangsung dan belum diterbitkannya rekomendasi.

2) **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan JPH telah ditetapkan target sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun target dan realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

3) **Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025**

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum ditetapkan target dan belum terdapat realisasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya.

4) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi hasil Pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut:

- a) rapat internal pembahasan indikator kinerja; dan
- b) perencanaan program kerja pengawasan JPH.

6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Efisiensi belum dapat diukur karena belum terdapat capaian dan pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran program.

7) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 adalah belum tersusunnya instrumen kerja yang mendukung pencapaian realisasi dari indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan JPH pada triwulan I

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. Menyusun program kerja terkait rekomendasi hasil pengawasan JPH;
- ii. Menyusun instrumen kerja terkait pencapaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan JPH; dan
- iii. Menyusun *timeline* pengawasan JPH yang terintegrasi.

b. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	-	-	-

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan lembaga dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Kepatuhan dinilai berdasarkan hasil kegiatan pengawasan JPH. Semakin tinggi persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga, maka semakin efektif pengawasan JPH. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan risiko ketidaksesuaian terhadap standar halal dan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60%. Pada triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH belum ditetapkan target pada Rencana Kinerja Tahunan dan belum terdapat capaian indikator kinerja karena proses pengawasan masih berlangsung, serta belum tersusunnya instrumen yang digunakan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha dan lembaga.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 60% pada akhir tahun 2025, namun target dan realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum ditetapkan target dan belum terdapat realisasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target pada triwulan I adalah melaksanakan rapat internal pembahasan program kerja pengawasan JPH.

6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Efisiensi belum dapat diukur karena belum terdapat capaian dan pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran program.

7) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum tersedianya instrumen standar atau pedoman teknis yang menjadi acuan baku dalam pengukuran atas kepatuhan; dan
- ii. belum tersedianya parameter penilaian yang terstandarisasi menyebabkan subjektivitas dalam evaluasi dan tidak dipastikan validitas datanya.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi adalah menyusun instrumen pengukuran kepatuhan yang mencakup variabel kepatuhan administratif dan teknis;

1. **Sasaran Program Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal**

a. **Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%	120 Lembaga	-	-

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun. Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga. Pada triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya belum ditetapkan target pada Rencana Kinerja Tahunan dan belum terdapat capaian indikator kinerja karena keterbatasan sumber daya pembinaan, belum dilaksanakan perencanaan program, dan instrumen evaluasi capaian indikator secara formal. Pelaksanaan indikator pada triwulan I tahun 2025 masih berada dalam tahap persiapan dalam bentuk koordinasi dengan lembaga JPH dan penyusunan instrumen capaian indikator kinerja.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga pada akhir tahun 2025, namun target dan realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kerjanya baru dapat dilihat pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum ditetapkan target dan belum terdapat realisasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut:

- b) Identifikasi Data dan Penyusunan Konsep Program Pembinaan LPH Terakreditasi;
- c) Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH; dan

- d) Pembinaan dan Monitoring Lembaga JPH.
- 6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
Efisiensi belum dapat diukur karena belum terdapat capaian dan pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran program.
- 7) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- a) Kendala
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :
- terdapat efisiensi anggaran tahun 2025;
 - belum tersusunnya program kerja dan instrumen evaluasi peningkatan pemahaman bagi lembaga JPH yang terbina; dan
 - belum terdapat kurasi data dan pemetaan kategori pembinaan LPH dan LP3H.
- b) Tindak Lanjut Rekomendasi
Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :
- menyusun rencana anggaran sesuai program kerja;
 - menyusun program kerja dan *timeline* pembinaan JPH; dan
 - identifikasi dan pemetaan data LPH dan LP3H yang akan dibina berdasarkan kualifikasi dan capaian kinerja.

b. Persentase SDM Halal yang Berkompeten

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	-	-	-

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Berkompeten

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran dalam penyelenggaraan JPH, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal dan penyelia halal. Sumber Daya Manusia (SDM) halal yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat melalui instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya. Semakin tinggi persentase SDM Halal yang berkompeten maka mencerminkan penyelenggaraan JPH dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar nasional/internasional. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal. Pada

triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja Persentase SDM Halal yang berkompeten belum ditetapkan target pada Rencana Kinerja Tahunan dan belum terdapat capaian indikator kinerja karena internal lembaga masih belum memahami arah kebijakan dan standar operasional yang akan dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja. Pelaksanaan indikator pada triwulan I tahun 2025 masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal pada akhir tahun 2025, namun target dan realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum ditetapkan target dan belum terdapat realisasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I masih dilaksanakan tahap perencanaan dalam internal lembaga.

6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Efisiensi belum dapat diukur karena belum terdapat capaian dan pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran program.

7) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat rapat pembahasan terkait program pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten;
- ii. belum terdapat kesamaan persepsi pada internal lembaga terkait pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten; dan

- iii. anggaran terkait program pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten masih dalam proses revisi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melaksanakan rapat pembahasan terkait program pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten;
- ii. melaksanakan rapat koordinasi dengan internal pimpinan dan tim pembinaan untuk menyamakan persepsi terkait pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
- iii. melakukan koordinasi dengan bagian perencanaan dan anggaran terkait revisi anggaran program pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten.

c. Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan I (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%	-	-	-

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Gerakan Sadar Halal adalah suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, penerapan sistem Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, promosi, dan kolaboratif. Daerah yang terlibat dalam Gerakan Sadar Halal adalah kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif dan nyata berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, atau memfasilitasi kegiatan Gerakan Sadar Halal di wilayahnya. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin luas jangkauan pelaksanaan gerakan sadar halal di tingkat daerah, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 90% atau sebanyak 53

Kota/Kabupaten. Pada triwulan I Tahun 2025, indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal belum ditetapkan target pada Rencana Kinerja Tahunan dan belum terdapat capaian indikator kinerja karena keterbatasan sumber daya pembinaan dan belum direncanakan program yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan indikator pada triwulan I tahun 2025 masih berada dalam tahap persiapan berupa identifikasi data daerah yang terlibat gerakan sadar halal dan perencanaan program gerakan sadar halal.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah ditetapkan target sebesar 90% atau sebanyak 53 Kota/Kabupaten pada akhir tahun 2025, namun target dan realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum ditetapkan target dan belum terdapat realisasi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut :

- a) Identifikasi Data Daerah yang terlibat Gerakan Sadar Halal; dan
- b) Perencanaan program Gerakan Sadar Halal.

6) Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Efisiensi belum dapat diukur karena belum terdapat capaian dan pada tahun 2025 tingkat efisiensi diukur berdasarkan sasaran program.

7) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. terdapat efisiensi anggaran tahun 2025; dan

ii. belum tersusunnya program kerja gerakan sadar halal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. menyusun rencana anggaran kerja yang sesuai dengan program kerja; dan
- ii. menyusun program kerja dan *timeline* pembinaan Jaminan Produk Halal.

Dalam rangka mewujudkan sasaran program, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah menetapkan target pada setiap indikator kinerja dalam sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	100 lembaga	11 lembaga	7,70%
	b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	55 kelompok masyarakat	-	0%
	c	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	20 lembaga	6 lembaga	21,00%

a. Persentase Lembaga yang Meningkat Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

- 1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang Meningkat Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jumlah lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan literasi JPH dan kapasitas lembaga terkait. Semakin tinggi persentase pemahaman lembaga yang telah terbina menunjukkan bahwa semakin efektif dalam melaksanakan pembinaan JPH. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga JPH secara profesional, kredibel dan sesuai standar yang berlaku.

Capaian indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur melalui jumlah lembaga JPH (Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH)) yang meningkat pemahamannya dibagi dengan jumlah lembaga JPH yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Target kinerja untuk indikator persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2025 sebesar 70%. Pada triwulan I, indikator ini telah direalisasikan sebesar 11 lembaga dengan capaian sebesar 7,70% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dari antara lain sebagai berikut :

a) LP3H

Pada Triwulan I sudah dilaksanakan pembinaan dan monitoring kepada 8 LP3H yaitu, Universitas Trunojoyo Madura, Bina Islam Berkarya Madura, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Negeri Surabaya dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Surabaya, Universitas Internasional dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

b) LPH

Pada Triwulan I belum dilaksanakan pembinaan terhadap LPH dikarenakan masih dalam tahap identifikasi data dan penyusunan konsep program pembinaan LPH terakreditasi.

c) LPP JPH

Pada Triwulan I sudah dilaksanakan pembinaan kepada 3 LPP JPH melalui Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH ke 3 Lembaga, yaitu Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang, Universitas Siliwangi, dan Universitas Trunojoyo Madura.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 100 lembaga atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I sebesar 11 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 7,70%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut :

- a) Identifikasi Data dan Penyusunan Konsep Program Pembinaan LPH Terakreditasi;
- b) Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH; dan
- c) Pembinaan dan Monitoring.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. terdapat efesiensi anggaran tahun 2025;
- ii. belum tersusunnya program kerja dan instrumen evaluasi peningkatan pemahaman bagi lembaga JPH yang terbina; dan
- iii. belum terdapat kurasi data dan pemetaan terkait kategori pembinaan LPH dan LP3H.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. menyusun rencana anggaran sesuai program kerja;
- ii. menyusun program kerja dan *timeline* pembinaan Jaminan Produk Halal; dan

- iii. melakukan identifikasi dan pemetaan data terkait LPH dan LP3H yang akan dibina berdasarkan pada kualifikasi dan capaian kinerja.

b. Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM Halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.

Semakin tinggi persentase SDM Halal yang meningkatkan pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa SDM Halal semakin profesional dan siap menjalankan tugas penyelenggaraan JPH secara efektif. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 55 kelompok dengan persentase sebesar 70%. Pada triwulan I, indikator ini belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan berupa penyusunan konsep program pembinaan SDM Halal, sehingga angka realisasinya sebesar 0% dari target yang ditetapkan.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 55 kelompok atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I hanya sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian

indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I adalah penyusunan konsep program pembinaan SDM Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat kurasi data dan pemetaan wilayah penyelenggaraan pembinaan auditor halal dan penyelia halal;
- ii. terdapat efisiensi belanja dan blokir anggaran sehingga diprioritaskan program skala besar; dan
- iii. penyesuaian rencana kerja oleh masing-masing tim pembinaan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan perencanaan dan analisis data sesuai dengan lingkup dan wilayahnya;
- ii. menyusun proyeksi anggaran lebih efektif; dan
- iii. menyusun *timeline* untuk masing-masing tim beserta programnya.

c. Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan. Semakin tinggi persentase pemahaman Pelaku usaha yang telah terbina menunjukkan bahwa Pelaku Usaha memahami kewajiban sertifikat halal dan dapat menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur dengan jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 20 lembaga dengan persentase

sebesar 70%. Pada triwulan I, realisasi tercapai sebesar 6 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 21% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bersama 1 asosiasi pelaku usaha yaitu Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) dan 5 lembaga (Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Yogyakarta, LP3H UIN Sunan Kalijaga, LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, LPH UIN Sunan Kalijaga, dan LPH UGM).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 20 lembaga atau dengan persentase 70% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I sebesar 6 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 21%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I adalah sosialisasi sertifikasi halal dan pembinaan Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha di Provinsi Yogyakarta.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. sulit untuk memperoleh data pelaku usaha yang valid;
- ii. minimnya kesadaran terkait sertifikasi halal dan pasifnya respon pelaku usaha; dan
- iii. perubahan proyeksi anggaran akibat adanya efisiensi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. meningkatkan sinergitas dengan Dinas Daerah, Pemerintah Daerah, dan asosiasi pelaku usaha dalam memperoleh data terkait binaan pelaku usaha;
- ii. melibatkan pihak Pemerintah Daerah dan asosiasi dalam membangun kesadaran sertifikasi halal kepada pelaku usaha; dan
- iii. menyusun rencana proyeksi anggaran dengan lebih efektif.

2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	120 lembaga	29 lembaga	24,17%
	b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	600 lembaga	119 lembaga	19,83%
	c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%	4 laboratorium	-	-
	d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	800 SDM Halal	119 SDM Halal	11,9%
	e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	678 pengawas	-	-

a. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap lembaga berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak

lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah diterbitkan rekomendasi diukur menggunakan rumus :

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga

B : Jumlah target pengawasan lembaga pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 120 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada triwulan I, realisasi tercapai sebesar 29 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 24,17% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan tindak lanjut aduan terhadap 4 lembaga (Pondok Indah, Sate Khas Senayan, BKPM, dan Mansae) dan kegiatan pengawasan terpadu dan aduan (25 lembaga).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 120 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I tercapai realisasi sebesar 29 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 24,17%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut :

- a) tindak lanjut aduan terhadap 4 lembaga yaitu Pondok Indah, Sate Khas Senayan, BKPM, dan Mansae; dan
- b) kegiatan pengawasan terpadu dan aduan terhadap 25 lembaga.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat regulasi teknis terkait pencantuman keterangan tidak halal untuk dipedomani oleh pelaku usaha; dan
- ii. kementerian/lembaga belum memahami terkait relaksasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dan pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. memberikan rekomendasi berupa pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan
- ii. berkoordinasi secara aktif kepada Kementerian/Lembaga terkait relaksasi kewajiban bersertifikat halal bagi produk impor dan pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

b. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk

B : Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 600 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada triwulan I, realisasi tercapai sebesar 119 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 19,83% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 119 lembaga dan 611 produk.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 600 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I tercapai realisasi sebesar 119 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 19,83%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut :

- a) melakukan pengawasan terhadap 119 lembaga; dan
- b) melakukan pengawasan terhadap 611 produk.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat identifikasi risiko terhadap pelaku usaha dan produk mengakibatkan tidak tersedianya skala prioritas dalam pelaksanaan pengawasan untuk tahun berjalan;
- ii. tidak tersedianya identifikasi risiko terkait objek pengawasan;
- iii. tidak tersedianya alokasi sumber daya manusia untuk pengawasan; dan
- iv. kurangnya anggaran pengawasan.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan penyusunan instrumen dan parameter identifikasi risiko;
- ii. melakukan sinkronisasi data dari sistem informasi SIHalal untuk memetakan seluruh pelaku usaha yang aktif, sehingga dapat diolah menggunakan instrumen risiko yang telah disusun untuk menghasilkan daftar kategori risiko (Tinggi, Sedang, Rendah).

c. **Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar**

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar

Jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Semakin tinggi persentase laboratorium yang memenuhi standar, menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium penyelenggara JPH beroperasi dengan kualitas dan standar yang sesuai. Capaian persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar menggambarkan jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Pengukuran indikator kinerja tersebut diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laboratorium penyelenggara JPH yang telah dilakukan pembinaan

B : Jumlah target laboratorium yang dimiliki LPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 4 laboratorium dengan persentase sebesar 17%. Pada triwulan I, belum terdapat laboratorium yang

memenuhi standar, sehingga belum terdapat realisasi dan capaian kinerja pada periode ini.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar telah ditetapkan target sebesar 4 laboratorium atau dengan persentase sebesar 17% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I tidak tercapai karena belum terdapat laboratorium yang memenuhi standar.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I adalah pengujian laboratorium difokuskan pada ruang lingkup Alkohol dan DNA dimana terdapat 23 Sertifikat Hasil Uji dengan rincian 3 SHU pengujian Alkohol menggunakan metode SNI 8965:2021 dan metode inhouse analisis kadar alkohol berbasis teknik headspace dengan sampel produk minuman sari buah dan 20 SHU pengujian protein dengan metode Metode inhouse analisis peptida menggunakan LC-HRMS dengan sampel Marshmallow, permen jelly, dan gelatin.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. kurangnya pemahaman analisis terkait metode sampling, analisis resiko, dan validasi laboratorium;
- ii. kurangnya kemampuan analisis laboratorium dalam memverifikasi instrumen *Gas Chromatography* (GC); dan
- iii. kurangnya pemahaman dan kemampuan analisis laboratorium dalam metode biologi molekuler.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan kegiatan pembahasan metode sampling, analisis resiko, dan validasi laboratorium;
- ii. melaksanakan pelatihan untuk analis laboratorium dalam rangka peningkatan kemampuan verifikasi instrumen *Gas Chromatography* (GC); dan
- iii. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan analis laboratorium dalam metode biologi molekuler.

d. **Persentase SDM Halal yang Mematuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH**

1) **Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Memenuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH**

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, pendamping (P3H) dan penyelia halal. Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semakin tinggi persentase SDM yang mematuhi regulasi, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan JPH semakin baik. Capaian indikator SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi

B : Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 800 SDM Halal dengan persentase sebesar 80%. Pada triwulan I, realisasi tercapai sebesar 119 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 11,9% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 119 pendamping proses produk halal (P3H).

2) **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 800 SDM atau dengan persentase sebesar 80% pada

akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I tercapai realisasi sebesar 119 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 11,9%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I adalah pengawasan terhadap 119 Pendamping Produk Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. aplikasi SIHalal belum memiliki fitur untuk melakukan pengawasan *ondesk* terhadap LP3H dan P3H;
- ii. sebagian data laporan pendampingan P3H mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menampilkan indikator pengawasan berupa foto produk dan/atau foto P3H di lokasi produksi atau *outlet*; dan
- iii. perbandingan jumlah laporan pendampingan P3H dan kemampuan pengawas JPH dalam melakukan pengawasan *ondesk* tidak ideal.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPJPH untuk melakukan penarikan data laporan pendampingan P3H agar dapat melakukan pengawasan *ondesk* terhadap LP3H dan P3H;
- ii. data yang dinyatakan rusak akan diklasifikasi sebagai temuan *error* yang tidak dapat mempengaruhi penilaian.

e. Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

Pengawas JPH merupakan ASN Jabatan Fungsional (JF) JPH yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal, baik usaha, lembaga penyelenggara, maupun produk halal, sesuai standar prosedur dan regulasi teknis yang berlaku. Semakin tinggi persentase pengawas yang memperoleh pembinaan, maka menunjukkan bahwa pembinaan pengawas JPH berjalan secara sistematis dan konsisten untuk menjaga kualitas pengawasan JPH. Capaian indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapatkan pembinaan dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah JF Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

B : Jumlah JF Pengawas JPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 678 Pengawas JPH dengan persentase sebesar 75%. Pada triwulan I, belum terdapat pengawas JPH telah dibina karena belum terdapat ASN JF Pengawas JPH yang telah diangkat.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan telah ditetapkan target sebesar 678 Pengawas JPH atau dengan persentase sebesar 75% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada triwulan I belum tercapai karena belum terdapat ASN JF Pengawas JPH yang telah diangkat.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, indikator belum dapat dibandingkan dengan triwulan lainnya karena masih berada pada triwulan I.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada triwulan I antara lain sebagai berikut :

- a) kegiatan penyusunan naskah urgensi penyelarasan Peraturan Menteri PANRB tentang JF Pengawas JPH;
- b) kegiatan penyusunan berita acara ekspose penyelarasan Peraturan Menteri PANRB tentang JF Pengawas JPH;
- c) kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja JF Pengawas JPH; dan
- d) kegiatan Persetujuan Menteri PANRB tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas JPH.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat pembinaan CPNS JF Pengawas;
- ii. belum ditetapkannya Penetapan PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2023 tentang JF Pengawas JPH; dan
- iii. belum ditetapkannya analisis jabatan dan analisis beban kerja JF Pengawas JPH.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan kegiatan pembinaan CPNS JF Pengawas;
- ii. mengkoordinasikan Penetapan PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PermenPAN RB Nomor 12 Tahun 2023 tentang JF Pengawas JPH bersama dengan Menteri PAN RB; dan
- iii. melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja JF Pengawas JPH.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2025 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah dikurangi blokir adalah sebesar Rp 20.015.965.000,- (dua puluh milyar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp47.837.930,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), sehingga capaian anggaran 0,24%, dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput,
Periode Maret 2025

Kementerian : 142 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Unit Organisasi : 01 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Satuan Kerja : 693733 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20.015.965,000	0	0	47.837,930	47.837,930	0.24 %	19.968.127,070
DC Program Kenukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	20.015.965,000	0	0	47.837,930	47.837,930	0.24 %	19.968.127,070
DC.7161 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	20.015.965,000	0	0	47.837,930	47.837,930	0.24 %	19.968.127,070
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	9,633,186,000	0	0	0	0	0.00 %	9,633,186,000
QDB.001 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	9,633,186,000	0	0	0	0	0.00 %	9,633,186,000
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2,910,385,000	0	0	0	0	0.00 %	2,910,385,000
QDC.001 SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	2,910,385,000	0	0	0	0	0.00 %	2,910,385,000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,472,394,000	0	0	47,837,930	47,837,930	0.64 %	7,424,556,070
QIC.001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3,483,945,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0.13 %	3,479,345,000
QIC.002 SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3,988,449,000	0	0	43,237,930	43,237,930	1.08 %	3,945,211,070

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal dan Meningkatkan kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal. Hal ini dikarenakan Deputy Bidang Pengawasan dan Pembinaan Jaminan Produk Halal adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.

C. HIGHLIGHT KINERJA

Highlight Kinerja memuat capaian kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja. Terdapat beberapa program di Direktorat Bina JPH dalam mendukung tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang dapat menggambarkan efektivitas program, diantaranya :

1. Inovasi dalam proses verifikasi dan validasi calon LP3H

Pada Triwulan I tahun 2025, Tim Pembinaan LP3H dan P3H telah melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap calon Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya inovasi dalam proses pembinaan, dengan metode **paparan program kerja** oleh masing-masing calon LP3H.

Melalui paparan tersebut, Tim Pembinaan dapat menilai sejauh mana calon LP3H memahami tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil paparan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pembinaan lebih lanjut, sehingga proses pembinaan LP3H dan P3H dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

Pada periode ini, Tim Pembinaan telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap **19 calon LP3H**. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan kesiapan lembaga untuk menjalankan peran strategisnya dalam mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal

2. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Pelatihan bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu **pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh LP3H** dan **pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) yang difasilitasi oleh BPJPH**. Kedua metode ini telah berjalan sejak tahun sebelumnya dan terus dilanjutkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas P3H.

Pada Triwulan I tahun 2025, pelatihan mandiri diikuti oleh **1.146 P3H**, sedangkan pelatihan melalui LMS diikuti oleh **5.668 P3H**. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan komitmen dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan P3H, sehingga mereka lebih siap mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal.

3. Silaturahmi dan Pembinaan LPH

Kegiatan Silaturahmi dan Pembinaan LPH dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja Tahun 2024 dan penguatan sinergi program BPJPH Tahun 2025. Peserta LPH yang hadir berasal dari 21 LPH Utama dan 63 LPH Pratama yang dilaksanakan secara hybrid.

Hasil dari kegiatan ini terjalin diskusi antara LPH dan BPJPH terkait beberapa kendala/masalah yang dialami LPH dan beberapa langkah strategi pendukung dan penguatan dalam menangani masalah/kendala yang dialami LPH.





5. indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan belum terdapat realiasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya.

Beberapa indikator kinerja belum memiliki realisasi karena Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan unit kerja baru di bawah BPJPH sebagai LPNK yang masih berada dalam tahap persiapan dan perencanaan.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) sasaran program. Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja, namun untuk keduanya belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, namun untuk ketiganya belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya. Pada Triwulan I tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar 20.015.965.000,- (dua puluh milyar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp47.837.930,- Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH dengan 3 (tiga) indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

1. indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 7,70%;
2. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan belum terlaksananya realisasi, sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%; dan
3. indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 21%.

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal dengan 5 (lima) indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

1. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 24,17%;
2. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 19,83%;
3. indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar belum terdapat realisasi pada triwulan I, sehingga tidak dapat dihitung capaian kinerjanya;
4. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 11,9%; dan